

Bandung, 7 Mei 2024

Hal : **Keterangan Bawaslu Provinsi Jawa Barat terhadap Perkara Nomor: 142-02-0-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Bukan Calon pada Pemilihan DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kota Depok.**

Yang Mulia,
Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI : Bawaslu
No. 142-02-0-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
Hari : Selasa
Tanggal : 07 Mei 2024
Jam : 08.36

Dengan hormat, bersama ini Kami:

- 1 Nama : Zacky Muhammad Zam Zam
Jabatan : Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat
Alamat Kantor : Jl. Turangga No. 25 Kelurahan Turangga,
Kecamatan Lengkong, Kota Bandung 40261
Telp. 022-61504245/7332604
Email: hukum.jabarbawaslu@gmail.com
- 2 Nama : Harminus Koto
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat
Alamat Kantor : Jl. Turangga No. 25 Kelurahan Turangga,
Kecamatan Lengkong, Kota Bandung 40261
Telp. 022-61504245/7332604
Email: hukum.jabarbawaslu@gmail.com
- 3 Nama : Muamarullah
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat
Alamat Kantor : Jl. Turangga No. 25 Kelurahan Turangga,
Kecamatan Lengkong, Kota Bandung 40261
Telp. 022-61504245/7332604
Email: hukum.jabarbawaslu@gmail.com
- 4 Nama : Nuryamah
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat

- Alamat Kantor : Jl. Turangga No. 25 Kelurahan Turangga,
Kecamatan Lengkong, Kota Bandung 40261
Telp. 022-61504245/7332604
Email: hukum.jabarbawaslu@gmail.com
- 5 Nama : Usep Agus Zawari
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat
Alamat Kantor : Jl. Turangga No. 25 Kelurahan Turangga,
Kecamatan Lengkong, Kota Bandung 40261
Telp. 022-61504245/7332604
Email: hukum.jabarbawaslu@gmail.com
- 6 Nama : Syaiful Bachri
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat
Alamat Kantor : Jl. Turangga No. 25 Kelurahan Turangga,
Kecamatan Lengkong, Kota Bandung 40261
Telp. 022-61504245/7332604
Email: hukum.jabarbawaslu@gmail.com
- 7 Nama : Fereddy
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat
Alamat Kantor : Jl. Turangga No. 25 Kelurahan Turangga,
Kecamatan Lengkong, Kota Bandung 40261
Telp. 022-61504245/7332604
Email: hukum.jabarbawaslu@gmail.com

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (Terlampir), yang telah diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu, dalam hal ini memberi keterangan dalam Register Perkara Nomor 142-02-0-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Bukan Calon pada Pemilihan DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kota Depok;

Perkenankanlah Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia, Bawaslu Provinsi Jawa Barat menyampaikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait dugaan kecurangan pemilu legislatif DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kota Depok Tahun 2024-2029. Terhadap hal tersebut Bawaslu Provinsi Jawa Barat menerangkan sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa Bawaslu Kota Depok tidak pernah menerima Laporan, Temuan dan Permohonan Sengketa yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

- 1) Bahwa Bawaslu Kota Depok telah melakukan tugas Pencegahan dalam bentuk Imbauan Pada Tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara Pada Pemilu tahun 2024 kepada KPU Kota Depok Nomor 78/PM.00.01/K.JB/02/2024 tertanggal 17 Februari 2024 yang pada pokoknya mengimbau kepada KPU Kota Depok untuk memerintahkan kepada PPS melalui PPK untuk segera mengumumkan dan memastikan formulir Model C.HASIL SALINAN semua jenis pemilihan di tempat umum pada Kelurahan di wilayah kerjanya. (*Bukti PK. 14 - 1*).
- 2) Bahwa Bawaslu Kota Depok telah melakukan tugas Pengawasan berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 119/LHP/PM.00.03/03/2024 pada tanggal 4 Maret 2024 yang pada pokoknya:
 - a. Bahwa Bawaslu Kota Depok telah melakukan Pengawasan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kota Depok Serta Penetapan Hasil Pemilu Serentak Tahun 2024 pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024;
 - b. Bahwa pada saat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sawangan menyampaikan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Tingkat Kecamatan Sawangan dalam Rapat Pleno tersebut, terdapat saksi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menyampaikan keberatan karena terdapat perbedaan antara D-Hasil Kecamatan yang disepakati di Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan dengan D-Hasil yang disampaikan oleh PPK Sawangan pada Rapat Pleno Tingkat Kota Depok;
 - c. Bahwa berdasarkan kejadian tersebut, Bawaslu Kota Depok memerintahkan kepada KPU Kota Depok untuk melakukan pencermatan ulang atas Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Sawangan sehingga disepakati oleh peserta Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kota Depok untuk dilakukan pencermatan ulang tersebut. (*Bukti PK.14 - 2*).

- 3) Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (PANWASCAM) Sawangan telah melakukan pengawasan Pencermatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Sawangan, yang dilakukan dengan cara menyandingkan D Hasil Kecamatan dengan C Hasil. Terhadap hal tersebut diperoleh hasil pencermatan yang diuraikan dalam tabel sebagai berikut: (*Bukti PK.14 - 3*).

**HASIL PENCERMATAN D.HASIL KECAMATAN DAN C.HASIL
DPR RI**

Nomor Partai	Nama Partai	D.HASIL KEC	C.HASIL	SELISIH
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	9457	9412	45
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	9475	9215	260
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	6972	6943	29
4	Partai Golongan Karya (GOLKAR)	22350	22361	-11
5	Partai Nasdem	5044	3730	1314
6	Partai Buruh	687	652	35
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA)	717	694	23
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	17572	17311	261
9	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	224	220	4
10	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	176	165	11
11	Partai Garda Republik Indonesia (GARUDA)	207	204	3

12	Partai Amanat Nasional (PAN)	14361	14304	57
13	Partai Bulan Bintang (PBB)	156	149	7
14	Partai Demokrat	2638	2585	53
15	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	3147	3085	62
16	Partai Persatuan Indonesia Raya (PERINDO)	642	623	19
17	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	1520	1493	27
24	Partai Ummat	667	653	14

**HASIL PENCERMATAN D.HASIL KECAMATAN DAN C.HASIL
DPRD PROVINSI**

Nomor Partai	Nama Partai	D.HASIL KEC	C.HASIL	SELISIH
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	6.811	6.811	0
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	21.801	21.622	197
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	6.697	6.690	7
4	Partai Golongan Karya (GOLKAR)	15.600	15.597	3
5	Partai Nasdem	2.230	2.225	5
6	Partai Buruh	898	894	4
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA)	638	637	1
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	22.607	22.565	42

9	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	173	172	1
10	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	147	148	-1
11	Partai Garda Republik Indonesia (GARUDA)	365	366	-1
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	5.367	5.362	5
13	Partai Bulan Bintang (PBB)	146	144	2
14	Partai Demokrat	1.910	1.908	2
15	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	3.433	3.414	19
16	Partai Persatuan Indonesia Raya (PERINDO)	646	645	1
17	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	1.695	1.679	16
24	Partai Ummat	798	779	19

**PERBANDINGAN D.HASIL KECAMATAN DAN C.HASIL DPRD
KOTA DEPOK**

Nomor Partai	Nama Partai	D.HASIL KEC	C.HASIL	SELISIH
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	11.549	11.549	0
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	17.360	17.360	0
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	10.163	10.163	0
4	Partai Golongan Karya (GOLKAR)	13.388	13.388	0
5	Partai Nasdem	2.144	2.144	0
6	Partai Buruh	593	593	0

7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA)	890	890	0
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	21.508	21.531	-23
9	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	679	679	0
10	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	195	195	0
11	Partai Garda Republik Indonesia (GARUDA)	0	0	0
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	7.070	7.070	0
13	Partai Bulan Bintang (PBB)	81	81	0
14	Partai Demokrat	1.598	1.598	0
15	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	2.652	2.646	6
16	Partai Persatuan Indonesia Raya (PERINDO)	470	471	-1
17	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	4.457	4.456	1
24	Partai Ummat	1.242	1.242	0

- 4) Bahwa setelah dilakukan pencermatan oleh PPK Sawangan pada tanggal 7 Maret 2024, saksi Partai NasDem menyampaikan surat Keberatan/Mosi Tidak Percaya atas Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kota Depok dan memutuskan *walkout* dari forum. (*Bukti PK.14 - 4*).
- 5) Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Depok Nomor 121/LHP/PM.00.03/03/2024 pada tanggal 9 Maret 2024 yang pada pokoknya:

- a. Bahwa saksi Partai Politik yang hadir dalam rapat pleno rekapitulasi tingkat Kota Depok yakni Saksi PKB, GERINDRA, PDI-P, GOLKAR, NASDEM, Partai Buruh, GELORA, PKS, PKN, HANURA, PAN, DEMOKRAT, PSI, PERINDO, PPP, dan Partai Ummat;
- b. Bahwa pembacaan hasil rekapitulasi selesai dibacakan dan disepakati oleh seluruh saksi Partai yang hadir pada pukul 05.00 WIB dan tidak ada keberatan atau kejadian khusus pada saat ditetapkannya hasil rekapitulasi pemilihan anggota DPR RI;
- c. Berdasarkan Hasil Rekapitulasi Tingkat Kota, berikut dilampirkan Jumlah Suara Partai DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kota Depok Daerah Pemilihan 6, sebagai berikut: (*Bukti PK.14 - 5*).

Nomor Partai	Nama Partai	DPR RI	DPRD PROVINSI	DPRD KOTA
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	85.692	68.430	96.460
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	133.581	171.045	154.307
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	96.678	94.867	112.521
4	Partai Golongan Karya (GOLKAR)	199.181	165.476	142.738
5	Partai Nasdem	53.970	34.899	37.063
6	Partai Buruh	12.998	17.223	12.013
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA)	8.695	7.617	9.502
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	242.264	284.222	257.819
9	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	3.175	2.522	7.428
10	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	2.230	2.086	2.341

11	Partai Garda Republik Indonesia (GARUDA)	2.195	4.335	-
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	83.588	53.764	58.833
13	Partai Bulan Bintang (PBB)	2.342	2.351	1.879
14	Partai Demokrat	60.161	47.985	71.339
15	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	50.815	58.904	49.625
16	Partai Persatuan Indonesia Raya (PERINDO)	12.312	13.060	17.078
17	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	16.857	18.560	47.171
24	Partai Ummat	7.266	8.539	10.274

- 6) Bahwa terkait dalil pada pokoknya menyatakan Bawaslu Kota Depok telah melanggar Tugas Bawaslu berdasarkan Pasal 93 poin dan Pasal 95 poin a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta tidak bertindak sebagaimana mestinya, terhadap dalil tersebut Bawaslu Kota Depok menerangkan telah menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya sesuai dengan Undang-Undang dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lainnya. Lebih lanjut terhadap hasil pencegahan, pengawasan dan penanganan dugaan pelanggaran lainnya sebagaimana yang berkenaan dengan pokok permohonan pemohon telah diuraikan oleh Bawaslu Kota Depok pada keterangan diatas.

Demikian keterangan Bawaslu Provinsi Jawa Barat yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Jawa Barat.

Hormat kami,

Bawaslu Provinsi Jawa Barat

Ketua,



(Zacky Muhammad Zam Zam)

Anggota,

(Harminus Koto)

Anggota,

(Muamarullah)

Anggota,

(Hj. Nuryamah)

Anggota,

(Usep Agus Zawari)

Anggota,

(Syaiful Bachri)

Anggota,

(Fereddy)